

## Pengaruh Belanja Pemerintah dan Pajak Daerah terhadap PDRB di 33 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara

Bonaraja Purba<sup>1</sup>, Hosiana Febby Yolanda Putri br Hutasoit<sup>2</sup>, Ilman Ashari Siregar<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Ekonomi, Jurusan Ilmu Ekonomi Universitas Negeri Medan

bonarajapurba@gmail.com<sup>1</sup>, Hosianahts@gmail.com<sup>2</sup>, Ilmanazhari78@gmail.com<sup>3</sup>

### ABSTRACT

*The purpose of this study is to analyze the effects of government spending and local taxes on GRDP in North Sumatra from 2016 to 2021. This study uses panel data analysis methods to determine the impact of independent variables on the dependent variable in 2016. panel data panel data analysis. the regression model after the Chow test and Hausman test showed that the effect model was still used. Based on t-statistic test (partial test). The probability values of government spending and local taxes are 0.000 and 0.0000, so it can be concluded that the variables of government spending and local taxes have a significant effect on GRDP.*

**Keywords :** Government Spending, Local Taxes, GRDP, Panel Data.

### ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis dampak belanja pemerintah dan pajak daerah terhadap PDRB Provinsi Sumatra Utara tahun 2016 hingga tahun 2021. Penelitian menggunakan metode analisis data panel untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen pada tahun 2016-2021. Analisis data panel data panel. Model regresi setelah uji Chow dan uji Hausman menunjukkan bahwa model yang digunakan adalah fixed effect. Berdasarkan uji t-statistik (uji parsial). Nilai probabilitas pengeluaran pemerintah dan pajak daerah sebesar 0.000 dan 0.0000 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah dan pajak daerah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap PDRB.

**Kata kunci :** Belanja Pemerintah, Pajak Daerah, PDRB, Data Panel.

### PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi merupakan proses peningkatan kapasitas perekonomian suatu negara dalam memproduksi barang dan jasa, sehingga menghasilkan peningkatan pendapatan nasional dalam bentuk produksi. Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang sangat penting untuk menganalisis perkembangan perekonomian suatu negara atau wilayah dalam jangka waktu tertentu dan mencapai kesejahteraan bersama. Pertumbuhan ekonomi daerah ditandai dengan peningkatan produksi barang dan jasa yang diukur dengan produk domestik bruto (PDB) Daerah. PDRB merupakan nilai tambah yang dihasilkan suatu daerah, unit atau industri dalam kurun waktu tertentu. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi daerah sejalan dengan pertumbuhan PDB daerah.

Sebagaimana dikemukakan Hadi Sasana pada tahun 2006, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mengacu pada nilai bersih produk akhir dan jasa yang dihasilkan dari berbagai kegiatan ekonomi di suatu wilayah tertentu selama jangka waktu tertentu.

Seperti kata Sukirno (2013), pertumbuhan dan perkembangan ini menggambarkan produksi barang dan jasa masyarakat dalam perekonomian pertumbuhan ekonomi. Alasan penambahan selalu merupakan penambahan Kuantitas dan kualitas faktor produksi

Pada dasarnya PDRB setiap tahunnya berubah-ubah. adapun jumlah perkembangan PDRB cukup berfluktuasi pada tahun-ke tahunnya.



Gambar 1. Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto di Indonesia pada tahun 2016-2021

Dari gambar 1. Dapat kita lihat perkembangan produk domestic regional bruto di indonesia di lihat bahwasannya dari tahun 2016-2021 menggambarkan trend positif atau dapat di katakan mengalami peningkatan yang baik dan terus meninggkat sampai pada tahun 2021 menunjukkan angka yang tertinggi. Tentunya kenaikan PDRB ini di sebabkan berbagai faktor yang mempengaruhinya seperti pengeluaran pemerintah daerah, pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU), dll.

Sejumlah indikator yang digunakan untuk meningkatkan nilai PDB suatu daerah atau negara. Pengeluaran pemerintah digunakan sebagai alat untuk merangsang kegiatan perekonomian. Pengeluaran pemerintah mengacu pada seluruh pengeluaran pemerintah dalam periode akuntansi tertentu yang berfokus pada hasil program dan kegiatan yang mengurangi kekayaan negara (Lestari dan Fitriyati, 2013). Pengeluaran pemerintah digunakan untuk kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat setempat (Rahman dan Chamelia, 2015).

Belanja pemerintah merupakan salah satu pelaksanaan program kerja pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan. Baru setelah proses konsumsi selesai, masyarakat dapat merasakan aktivitas pemerintah seperti: pengadaan infrastruktur, penggunaan subsidi, belanja pendidikan, dll. Salah satu poin dari strategi implementasi tersebut adalah belanja pemerintah. mekanisme biaya harus disusun sedemikian rupa sehingga proses konsumsi dapat dilakukan secara terkendali. Negara, sebagai LSM, tidak memiliki kewajiban untuk mencari keuntungan, tetapi bukan berarti dapat (mengggunakan) uang itu sesuai keinginannya. Pemeriksa negara

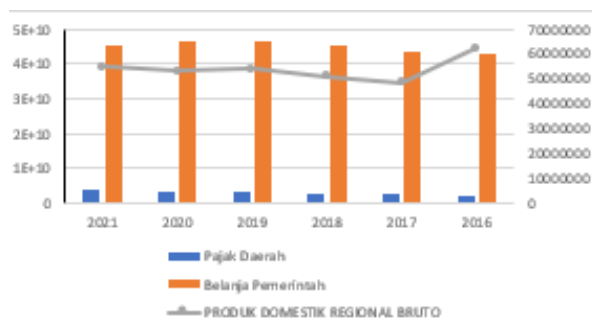
juga lebih memperhatikan pemeriksaan biaya, karena dalam praktiknya mayoritas kebocoran anggaran berada pada pelaksanaan biaya. Kebijakan belanja negara merupakan bagian dari kebijakan fiskal sebagai intervensi negara dalam perekonomian. Tugas negara dapat diselesaikan melalui kebijakan fiskal, kebijakan pengeluaran atau belanja negara. Dari situ, pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan untuk menyediakan barang dan jasa yang memenuhi kebutuhan masyarakat. Belanja sektor pemerintah berupa belanja komoditas, belanja modal, sebagian belanja subsisten dan belanja penunjang sangat penting dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pengeluaran pemerintah sangat penting untuk menjaga pertumbuhan ekonomi.

Selain masalah pengeluaran pemerintah, pajak daerah juga dapat memicu pertumbuhan dan PDB yang lebih tinggi. Pengertian pajak daerah adalah pembayaran wajib daerah yang dikenakan oleh orang perseorangan atau badan hukum yang mengikat secara hukum tanpa pertimbangan segera dan digunakan untuk kepentingan masyarakat setempat untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyatnya. 28 2009. Pajak atau retribusi yang dibayarkan penduduk lokal ke kota melayani kepentingan bersama negara dan daerah. Misalnya saja pembangunan jalan dan jembatan, penciptaan lapangan kerja baru, serta pembangunan dan pelayanan pemerintah lainnya. Selain penerimaan pajak pembangunan daerah, daerah merupakan sumber anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang digunakan pemerintah untuk menjalankan rencana usahanya.

Menurut Resmi (2019) pajak adalah transfer kekayaan dari orang ke uang Negara membiayai pengeluaran saat ini dan surplusnya digunakan untuk tabungan publik merupakan sumber utama pembiayaan untuk investasi publik. (Rahman & Chamelia, 2015).

Menurut Mardiasmo (2011:12), pajak daerah adalah pajak daerah yang bersifat wajib yang dikenakan kepada orang perseorangan atau badan hukum tanpa imbalan langsung menurut undang-undang, dan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan daerah untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Di bawah ini merupakan gambaran permasalahan yang terjadi di level Indonesia,berikut grafik dan perkembangan PDRB, belanja pemerintah,dan pajak daerah di Indonesia tahun periode 2016-2021



Gambar 2. Perkembangan jumlah PDRB,Belanja Pemerintah dan Pajak Daerah di Indonesai Tahun Periode 2016-2021

Pada Gambar 2. Dapat kita lihat dan amati bahwasannya PDRB cenderung tidak tetap atau mengalami perubahan tiap tahun ke tahunnya. perubahan ini tentu tidak terlepas dari kedua factor tersebut yang dimana kerap sekali di kaitkan dengan PDRB adalah belanja pemerintah ini di perkuat oleh penelitian-penelitian terdahulu .

Penelitian yang mengkaitkan antara belanja pemerintah dengan pdrb sudah banyak diteliti sebelumnya. Secara teori belanja pemerintah memberi pengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi. Hal ini sejalan dengan hasil peneliti sebelumnya Tara may sabilla dan Hadi sumarsono (2022) dan Roni Mauliansyah dkk (2017). Namun hasil riset ini bertentangan dengan hasil riset peneliti lainnya, Afrizal, Sitrah (2013) menyimpulkan bahwa belanja pemerintah berpengaruh negatif terhadap pdrb.

Selain belanja pemerintah, variabel yang sering kerap kali di kaitkan dengan PDRB adalah Pajak daerah. Menurut Mardiasmo (2011:12), pajak daerah adalah pajak daerah yang bersifat wajib yang dikenakan kepada orang perseorangan atau badan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tanpa imbalan langsung, dan dirancang untuk memenuhi kebutuhan daerah untuk rakyat.

Kajian yang mengaitkan antara pajak daerah dengan PDRB sudah banyak di teliti oleh terdahulu sebelumnya. Secara teori pajak daerah memberi pengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi. Hal ini sejalan dengan hasil peneliti sebelumnya Miswar dkk (2021) dan Dwika Julia (2015).

Tentu saja kesenjangan antara hasil penelitian antara peneliti tumbuh Sebuah studi menarik mengungkapkan lebih banyak terutama hubungan antara belanja pemerintah, pajak daerah dan PDRB terjadi di Provinsi Sumatera Utara. Berbagai laporan dan hasil penelitian Korelasi empiris antara PDRB, belanja pemerintah dan pajak daerah terhadap pertumbuhan. Namun, hasil penelitian dari berbagai peneliti sebelumnya mengumumkan bahwa itu masih ada Gap (kesenjangan penelitian), bahkan sebaliknya dalam arah teoretis. Pikirkan tentang itu belanja pemerintah , pajak daerah dan PDRB masalah umum di tengah kehidupan manusia, ini yang menjadi dasar peneliti untuk meneliti kembali variabel-variabel independen yang memepengaruhi varibael dependen dengan metode dan sistem yang berbeda. dengan bertujuan menjadi titik tengah dalam perbedan penelitian-penelitian terdahulu.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini digunakan software eviews versi 10 untuk melakukan analisis regresi data panel. Data yang digunakan dalam regresi data panel berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2016 hingga tahun 2021, data yang digunakan adalah kota/kabupaten Sumatera Utara. data yang terdiri dari 33 kabupaten/kota. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

Y = PDRB

X1 = Belanja Pemerintah

X2 = Pajak Daerah

Tahapan yang dilakukan pada analisis data panel ini:

- Menentukan pendugaan estimasi parameter pada regresi data panel :
  - a. Common effect model
  - b. Fixed Effect Model
  - c. Random Effect Model
- Menentukan pemilihan model terbaik:
  - a. Uji Chow dilakukan untuk menentukan model terbaik antara CEM dan FEM dan untuk menentukan apakah model terbaik muncul dengan cepat. Namun jika model terbaik adalah FEM, langkah selanjutnya adalah mengujinya menggunakan Hausmann.
  - b. Uji Hausman mengetahui model mana yang terbaik antara FEM dan SEM. Dalam uji Hausman ini, jika model terbaik adalah REM, maka model terbaik segera diperoleh. Namun jika model yang diperoleh adalah FEM maka langkah selanjutnya adalah melakukan uji hipotesis klasik.
- Uji asumsi klasik yaitu: normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, autokorelasi
- Dilakukan uji signifikansi. Berikut adalah tes untuk parameter penting:
  - a. Tes keseluruhan
  - b. Uji Parsial
- Interpretasi model

**Bahan Penelitian**

Secara umum model regresi panel memiliki persamaan sebagai berikut (Tyas Ayu Prasanti, dkk., 2015).

$$y_{it} = \beta_{it} + \sum_{k=1}^K \beta_{k_{it}} x_{k_{it}} + \varepsilon_{it}$$

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dari hasil pengolahan data didapatkan hasil sebagai berikut :

Tabel 1. Hasil CEM

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-12.35920	2.001459	-6.175095	0.0000
LOG(BELANJAPEMERINTAH)	0.596110	0.124005	4.807148	0.0000
LOG(PAJAKDAERAH)	0.544243	0.047362	11.49107	0.0000

Dari Tabel 1 dapat dilihat bahwa hasil pengujian model common effect memberikan penjelasan bahwa semua variabel yakni belanja pemerintah dan pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap PDRB 33 kab/kota di Sumut.

Tabel 2. Hasil FEM

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-11.04575	1.832247	-6.028527	0.0000
LOG(BELANJAPEMERINTAH)	0.483166	0.114071	4.235662	0.0000
LOG(PAJAKDAERAH)	0.605848	0.043560	13.90842	0.0000

Tabel 2 menunjukkan bahwa hasil pengujian model fixed effect menunjukkan bahwa semua variabel yakni belanja pemerintah dan pajak daerah berpengaruh besar terhadap peningkatan produk domestik bruto 33 kab/kota di Sumut.

Tabel 3. Hasil REM

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-12.35920	1.810662	-6.825790	0.0000
LOG(BELANJAPEMERINTAH)	0.596110	0.112184	5.313697	0.0000
LOG(PAJAKDAERAH)	0.544243	0.042847	12.70193	0.0000

Tabel 3 menunjukkan bahwa hasil uji model random effect menunjukkan bahwa semua variabel yakni belanja pemerintah dan pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap peningkatan produk domestik bruto 33 kab/kota di Sumatera Utara.

### Pemilihan Model Regresi Data panel

#### Uji Chow

Tabel 4. Hasil Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Period F	9.846077	(5,190)	0.0000

Dari Tabel 4, hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil probabilitas cross section F sebesar  $0.0000 < 0.05$ . maka dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa dalam uji ini model fixed effect model terpilih.

#### Uji Hausman

Tabel 5. Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Period random	47.342634	2	0.0000

Dari Tabel 5, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa probabilitas random cross section adalah  $0,0000$  dan  $< . 0,05$ . Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa model fixed effect dipilih untuk pengujian ini.

### Pengujian Asumsi Klasik

#### Uji Multikolinearitas

**Tabel 6. Hasil Uji Multikolinearitas**

	BELANJAPE...	PAJAKDAERAH
BELANJAPE...	1.000000	0.824518
PAJAKDAER...	0.824518	1.000000

Berdasarkan hasil diatas nilai koefisien variabel independen menunjukkan tidal ada variabel independen yang menunjukkan nilai koefisien diatas 0.9 sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa data penelitian ini tidak terdapat multikolinearitas.

### Uji Heteroskedastisitas

**Tabel 7. Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-7.620356	3.607281	-2.112493	0.0362
LOG(BELANJAPEMERINTAH)	0.357131	0.183107	1.950390	0.0528
LOG(PAJAKDAERAH)	-0.078802	0.084595	-0.931521	0.3530

Berdasarkan hasil yang didapatkan rata rata nilai probabilitas > 0.05 dan dapat menerangkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

### Pengujian Signifikasi Parameter

**Tabel 8. Hasil Uji Regresi Model Fixed Effect Model**

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-11.04575	1.832247	-6.028527	0.0000
LOG(BELANJAPEMERINTAH)	0.483166	0.114071	4.235662	0.0000
LOG(PAJAKDAERAH)	0.605848	0.043560	13.90842	0.0000
Effects Specification				
Period fixed (dummy variables)				
Weighted Statistics				
R-squared	0.829847	Mean dependent var	9.433549	
Adjusted R-squared	0.823579	S.D. dependent var	1.279168	
S.E. of regression	0.464988	Sum squared resid	41.08064	
F-statistic	132.3778	Durbin-Watson stat	0.272500	
Prob(F-statistic)	0.000000			

### Uji Statistik F (Uji Simultan)

Berdasarkan tabel 6, didapatkan bahwa nilai probabilitas (F-statistic) sebesar 0.0000 < 0.05. dapat disimpulkan bahwa, variabel belanja pemerintah dan pajak daerah secara bersama sama berpengaruh terhadap variabel pdrb.

### Uji Statistik T (Uji Parsial)

Berdasarkan tabel 6, didapatkan bahwa nilai probabilitas belanja pemerintah dan pajak daerah secara berurutan sebesar 0.0000 dan 0.0000 dan dapat disimpulkan bahwa variabel belanja pemerintah dan pajak daerah berpengaruh secara signifikan terhadap pdrb. Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Berdasarkan Tabel 8, kami menemukan bahwa nilai Adjusted R-squared adalah 0.829847%. Artinya variabel belanja pemerintah dan pajak daerah dapat menjelaskan 82.98% memiliki pengaruh variabel PDRB. Sisa 17.02% dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

Berdasarkan hasil pengujian di atas, model regresi data panel yang diperoleh yaitu model Fixed effect Model sebagai berikut :

$$\text{PDRB}_{it} = -11.04575it + 0.483166it + 0.605848it + \epsilon_{it}$$

Berdasarkan koefisien di atas maka dapat dijelaskan bahwa :

Konstanta sebesar -11.04575 menunjukkan bahwa seperti belanja pemerintah dan pajak daerah adalah konstan, maka pdrb di 33 kabupaten kota provinsi Sumatera Utara tahun 2016-2021 sebesar -11.04575 persen.

Nilai koefisien belanja pemerintah 0.483166 yang artinya jika setiap kenaikan belanja pemerintah sebesar 1 persen, maka akan meningkatkan jumlah pdrb 33 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara sebesar 0.483166 dengan asumsi variabel lain tetap. Dimana menunjukkan pengaruh yang searah antara variabel independent dengan variabel dependent. Nilai koefisien pajak daerah sebesar 0.605848 yang artinya jika variabel pajak daerah mengalami kenaikan 1% maka variabel pdrb akan mengalami kenaikan sebesar 0.605848 dengan asumsi bahwa variabel lain dianggap konstan atau dengan asumsi variabel lain tetap.

### **Pengaruh Belanja Pemerintah terhadap PDRB**

Dari hasil perhitungan diperoleh nilai probabilitas pengeluaran pemerintah sebesar 0,0000. Nilai koefisien variabel pengeluaran pemerintah sendiri bernilai positif sebesar 0,483166 yang menunjukkan bahwa ketika pengeluaran pemerintah meningkat sebesar 1 satuan maka dapat mempengaruhi rata-rata pertumbuhan PDB sebesar 0,48. Dari sini terlihat terdapat korelasi positif yang signifikan antara belanja 33 pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Utara dengan PDRB pada tahun 2016 hingga tahun 2021. Dampak tersebut disebabkan oleh alokasi belanja pemerintah yang cukup wajar, yang tentunya akan mempengaruhi PDRB 33 kabupaten dan kota di Sumut pada tahun 2016 hingga 2021.

Hal ini sesuai dengan penelitian Roni Mauliansyah dan Zainuddin Mard (2017). Belanja pemerintah merupakan alokasi anggaran yang disiapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada berbagai departemen atau daerah dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program. Belanja pemerintah diberikan kepada berbagai kelompok sosial dalam bentuk subsidi atau bantuan langsung. Negara dapat mempengaruhi tingkat keseimbangan pendapatan dengan dua cara berbeda. Pertama, pemerintah membeli barang dan jasa (G) yang merupakan komponen permintaan agregat. Kedua, pajak dan transfer berpengaruh terhadap hubungan antara produksi dan pendapatan. Transfer ke daerah merupakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang digunakan untuk melaksanakan desentralisasi, termasuk dana kompensasi dan otonomi khusus, dana Regional dan penyesuaian.

### **Pengaruh Pajak Daerah terhadap PDRB**

Hasil pengujian hipotesis pada penelitian ini menunjukkan bahwa nilai probabilitas pajak daerah sebesar 0,0000. Nilai koefisien variabel pajak daerah sendiri bernilai positif dan signifikan sebesar 0,605848 yang berarti hipotesis pengaruh pajak daerah terhadap PDRB Sumut telah teruji. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan pajak daerah dapat mempengaruhi pertumbuhan PDB, dengan rata-rata sebesar 0,60. Terlihat terdapat korelasi positif yang signifikan antara penerimaan pajak dengan PDB di 33 kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2016 hingga tahun 2021.

Pajak daerah berdampak terhadap PDRB 33 kabupaten kota di Sumut pada tahun 2016 hingga 2021, hal ini mungkin disebabkan oleh rendahnya kontribusi pajak daerah terhadap PDRB. Hal ini mungkin disebabkan oleh kurangnya peran pemerintah dalam mengidentifikasi potensi penerimaan pajak daerah, khususnya pemungutan pajak dan retribusi daerah, yang mungkin memiliki dampak pada peningkatan GDP di wilayah perkotaan tetangga di Sumatera Utara. Mengingat perpajakan daerah hanya memberikan kontribusi yang kecil terhadap peningkatan GDP, maka diharapkan kebijakan pemerintah lebih fokus pada aktif memanfaatkan potensi yang dimiliki masing-masing daerah.

Hal ini sesuai dengan teori pertumbuhan ekonomi. Indikator perekonomian yang dapat menunjukkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah produk domestik regional bruto (PDRB). PDRB merupakan cerminan tingkat perkembangan perekonomian suatu daerah. Semakin besar PDB atau semakin berkembang perekonomian suatu daerah, maka semakin tinggi pula pendapatan masyarakat di daerah tersebut. Dengan meningkatnya pendapatan, kekayaan, dan konsumsi masyarakat, maka kemampuan masyarakat (wajib pajak) dalam membayar pajak pun meningkat. Studi yang dilakukan Artha (2016), Nurrohman (2010) dan Haniz (2013) menunjukkan bahwa PDRB berdampak positif terhadap penerimaan pajak daerah di 33 kabupaten/kota di Sumut. Oleh karena itu, hipotesis berikut diajukan. H2 : PDRB diduga berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak daerah di 33 kabupaten/kota di Sumut. Secara teori, pajak daerah semacam ini termasuk dalam faktor produksi, khususnya akumulasi modal. Ketika penerimaan pajak melonjak maka produksi berupa barang dan jasa (PDRB) juga meningkat karena pajak daerah digunakan sebagai modal atau dana kegiatan/usaha produktif untuk menghasilkan output berupa barang dan jasa.

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah dan pajak daerah secara simultan dan parsial mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB di Sumatera Utara. Belanja pemerintah dan perpajakan daerah menyumbang 99,39% terhadap PDB Sumut. Sedangkan variabel terpenting dalam PDB Sumut adalah pajak daerah dan belanja pemerintah.

Berdasarkan temuan penelitian ini, penelitian ini berpendapat bahwa dampak pajak daerah terhadap PDB cukup besar karena dengan menurunnya pajak daerah, maka kesadaran

masyarakat akan pentingnya pajak daerah dalam meningkatkan program pemerintah terkait mendorong pembangunan daerah mulai menurun.

Adanya kebijakan pengelolaan pengeluaran pemerintah diharapkan dapat memenuhi kebutuhan di berbagai tempat dan memungkinkan kegiatan alokasi sumber daya pemerintah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Selain itu, kebijakan pemerintah diharapkan lebih fokus pada penggalian potensi peningkatan penerimaan pajak daerah guna memaksimalkan penerimaan pajak daerah di 33 kabupaten/kota di Sumut.

Bagi peneliti selanjutnya, perlu dilakukan penelitian yang lebih mendalam untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi PDRB Sumut dengan melibatkan variabel-variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini seperti pendapatan primer daerah, perpajakan daerah, belanja modal, dan lain-lain.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Sendow, J. E., Rotinsulu, D. C., & Kawung, G. M. (2021). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah terhadap PDRB Kota Manado. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 19(3), 17-27.
- Rofiq, A. (2020). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Tenaga Kerja terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2018. *OECONOMICUS Journal of Economics*, 5(1), 38-45.
- Kurniadi, F., & Gaffar, E. U. A. (2023). Pengaruh investasi dan pengeluaran pemerintah terhadap PDRB dan penyerapan tenaga kerja di Kota Bontang. *Jurnal Ilmu Ekonomi Mulawarman (JIEM)*, 8(1).
- Laisina, C., Masinambow, V., & Rompas, W. (2015). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Di Sektor Pendidikan Dan Sektor Kesehatan Terhadap Pdrb Melalui Indeks Pembangunan Manusia Di Sulawesi Utara Tahun 2002-2013. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 15(4).
- Mutiara, D. J. (2015). Pajak Daerah dan Pengaruhnya terhadap PDRB di Propinsi Kalimantan Timur. *Signifikan: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 4(1).
- Dewi, J. K., & Budhi, M. K. S. (2018). Analisis pengaruh pajak daerah, retribusi daerah terhadap tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi di Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 7(6), 1695-1722.
- Hidayat, A. S., & Nalle, F. W. (2017). Analisis Pengaruh Belanja Pemerintah, Tenaga Kerja, Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2015. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 15(1), 71-86.
- Amri, K. (2020). Kebijakan fiskal dan pertumbuhan ekonomi daerah: Bukti data panel di Indonesia. *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman*, 8(1), 1-18.
- Anitasari, M., & Soleh, A. (2015). Pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bengkulu. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 3(2).

- Sari, M., Syechalad, M. N., & Majid, S. A. (2016). Pengaruh investasi, tenaga kerja dan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik Indonesia*, 3(2), 109-115.
- Sabilla, T. M., & Sumarsono, H. (2022, January). Pengaruh belanja pemerintah, pendapatan asli daerah, penanaman modal dalam negeri, indeks pembangunan manusia terhadap PDRB. In *Forum Ekonomi* (Vol. 24, No. 1, pp. 54-64).